

Tourism Transformation as a Driver of Increasing Regional Original Income in Majene Regency in 2025

Syahrinullah¹

¹Program Studi Manajemen, Universitas Terbuka, Indonesia
Email: syahrinullah@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transformasi sektor pariwisata dapat berperan sebagai penggerak utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majene. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya penguatan peran pariwisata sebagai salah satu sumber utama PAD di tengah persaingan destinasi wisata regional dan nasional yang semakin ketat. Kabupaten Majene memiliki potensi wisata alam, budaya, dan maritim yang kaya, namun belum dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen kebijakan. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta tema utama yang berkaitan dengan potensi, hambatan, dan strategi pengembangan pariwisata daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi pariwisata di Majene menuntut sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengelola potensi lokal secara berkelanjutan, inovatif, dan inklusif. Rekomendasi yang dihasilkan menekankan pentingnya reformasi tata kelola pariwisata, peningkatan infrastruktur pendukung, serta kebijakan berbasis partisipasi masyarakat. Dengan demikian, transformasi pariwisata diharapkan menjadi katalis bagi peningkatan PAD sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah menuju pembangunan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Keyword: Transformasi Pariwisata; Pendapatan Asli Daerah; Pembangunan Daerah; Kebijakan Publik; Majene

ABSTRACT

This study aims to analyze how the transformation of the tourism sector can play a key role in increasing Regional Original Income (PAD) in Majene Regency. The urgency of this research lies in the need to strengthen the role of tourism as a primary source of PAD amidst increasingly fierce competition among regional and national tourist destinations. Majene Regency has rich natural, cultural, and maritime tourism potential, but it has not been managed optimally and sustainably. The research method uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, field observations, and policy document reviews. Data analysis is conducted thematically to identify patterns, relationships, and key themes related to the potential, obstacles, and strategies for regional tourism development. The results show that tourism transformation in Majene requires synergy between the local government, business actors, and the community in managing local potential in a sustainable, innovative, and inclusive manner. The resulting recommendations emphasize the importance of tourism governance reform, improving supporting infrastructure, and implementing policies based on community participation. Thus, tourism transformation is expected to be a catalyst for increasing PAD while strengthening the regional economic foundation towards competitive and sustainable development.

Keyword: Tourism Transformation; Local Original Income; Regional Development; Public Policy; Majene

Corresponding Author:

Syahrinullah,
Universitas Terbuka,
Gedung Fakultas III Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang
Selatan, 15418, Indonesia
Email: syahrinullah@ecampus.ut.ac.id



1. INTRODUCTION

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi daerah yang memiliki efek berganda (*multiplier effect*) tinggi. Sektor ini tidak hanya memberikan kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi, pajak hotel dan restoran, serta pengelolaan objek wisata, tetapi juga berperan besar dalam menggerakkan berbagai sektor ekonomi lainnya seperti perdagangan, transportasi, perhotelan, industri kreatif, dan jasa. Menurut *World Tourism Organization* (UNWTO, 2021), pariwisata bukan hanya berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pelestarian budaya dan peningkatan citra daerah di tingkat nasional maupun internasional. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pariwisata bahkan menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan memperluas kesempatan kerja berbasis sumber daya lokal.

Kabupaten Majene sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi besar untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Secara geografis, Majene terletak di pesisir barat Pulau Sulawesi dengan garis pantai yang panjang dan panorama alam yang menawan. Wilayah ini dikenal memiliki keindahan laut biru yang jernih, gugusan pulau kecil yang eksotis, serta pesona bawah laut yang memikat. Potensi tersebut membuka peluang pengembangan berbagai jenis wisata, mulai dari wisata bahari seperti *diving* dan *snorkeling*, hingga wisata pantai dan wisata kuliner pesisir. Selain kekayaan alam, Majene juga dianugerahi warisan budaya suku Mandar yang sarat nilai-nilai tradisi, seperti seni tenun, perahu tradisional *sandeq*, kuliner khas *jepa* dan ikan bakar Mandar, serta ritual adat yang unik. Kekayaan budaya tersebut menjadikan Majene memiliki daya tarik khas yang tidak dimiliki daerah lain.

Potensi besar ini sesungguhnya menjadi modal utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata berbasis budaya dan masyarakat lokal. Model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*) menjadi relevan untuk diterapkan di Majene karena keberhasilan sektor ini sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi, pelayanan wisata, serta kegiatan promosi. Masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, melainkan pelaku utama yang terlibat langsung dalam menciptakan pengalaman wisata yang autentik dan berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan peran masyarakat lokal dalam sektor pariwisata menjadi kunci agar manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dapat dirasakan secara merata.

Namun demikian, potensi besar yang dimiliki Kabupaten Majene belum sepenuhnya terkelola secara optimal. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat (2025) menunjukkan bahwa jumlah perjalanan wisatawan nusantara asal Kabupaten Majene dari Januari hingga Juni 2025 mencapai total 336.458 perjalanan, dengan rincian Januari (57.286), Februari (57.850), Maret (42.578), April (63.323), Mei (54.200), dan Juni (61.221). Angka ini menggambarkan adanya mobilitas wisatawan yang cukup tinggi. Akan tetapi, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Majene masih tergolong rendah. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tingginya potensi dan aktivitas wisata dengan nilai ekonomi yang dihasilkan bagi daerah.

Beberapa faktor penyebab utama dari belum optimalnya sektor pariwisata di Kabupaten Majene antara lain:

1. Keterbatasan infrastruktur pendukung.

Aksesibilitas menuju lokasi wisata masih menjadi tantangan utama. Banyak destinasi wisata yang sulit dijangkau karena kondisi jalan yang rusak, minimnya transportasi umum, dan kurangnya fasilitas pendukung seperti toilet umum, tempat istirahat, dan papan informasi.

2. Kurangnya promosi dan pemasaran digital.

Di era digital, keberhasilan pariwisata sangat dipengaruhi oleh kemampuan promosi melalui media sosial, *website*, dan platform digital lainnya. Namun, promosi wisata Majene masih bersifat konvensional, belum terintegrasi secara profesional, dan belum mampu menjangkau pasar wisatawan nasional maupun mancanegara.

3. Pengelolaan destinasi yang belum profesional.

Sebagian besar destinasi wisata belum memiliki sistem manajemen yang terstruktur, baik dalam hal tiket masuk, kebersihan, keamanan, maupun pengelolaan fasilitas. Kondisi ini menyebabkan pengalaman wisatawan kurang optimal.

4. Rendahnya inovasi produk wisata.

Produk wisata di Majene masih bersifat umum dan belum banyak menawarkan pengalaman tematik seperti wisata edukasi, ekowisata, atau wisata berbasis budaya lokal yang mampu menarik segmen wisatawan baru.

Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian Santoso (2023) dan Hartono et al. (2023) yang menyebutkan bahwa daerah dengan potensi wisata besar sering kali menghadapi kendala struktural, seperti lemahnya manajemen destinasi, keterbatasan infrastruktur, dan promosi yang tidak maksimal. Akibatnya,

potensi ekonomi dari pariwisata tidak dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD maupun kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, perubahan pola wisatawan di era digital menuntut adanya transformasi dalam pengelolaan pariwisata daerah. Transformasi yang dimaksud mencakup digitalisasi promosi, peningkatan kualitas layanan, inovasi produk wisata, serta sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat (*multistakeholder approach*). Dalam konteks inilah, urgensi penelitian mengenai transformasi pariwisata sebagai penggerak peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majene tahun 2025 menjadi sangat relevan. Tanpa adanya strategi transformasi yang terarah, potensi besar pariwisata Majene berisiko tidak termanfaatkan secara optimal dan daerah akan tertinggal dalam persaingan destinasi wisata regional maupun nasional.

Urgensi penelitian ini juga didorong oleh kebutuhan untuk memperkuat peran sektor pariwisata sebagai salah satu sumber utama PAD. Sebagai sektor dengan efek pengganda tinggi, pariwisata tidak hanya memberikan dampak ekonomi langsung, tetapi juga menciptakan peluang kerja, memperkuat sektor UMKM, dan mendorong investasi daerah. Dengan manajemen yang tepat, pariwisata dapat menjadi katalis bagi peningkatan ekonomi lokal sekaligus pelestarian budaya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis potensi lokal.

Selain itu, posisi geografis Kabupaten Majene yang strategis di jalur poros barat Sulawesi memberikan peluang besar dalam pengembangan pariwisata lintas daerah. Majene dapat menjadi simpul destinasi wisata yang menghubungkan kawasan wisata di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Dengan potensi tersebut, pengembangan pariwisata Majene perlu diarahkan pada konsep *destination integration*, yaitu integrasi antara destinasi, infrastruktur, promosi, dan komunitas lokal dalam satu ekosistem pariwisata yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang meliputi: (1) peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia pariwisata; (2) penguatan promosi digital dan *branding* destinasi berbasis identitas budaya Mandar; (3) pembangunan dan perbaikan infrastruktur wisata; serta (4) kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk memperkuat daya saing pariwisata daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong transformasi sektor pariwisata Majene dari sekadar potensi menjadi kekuatan ekonomi nyata bagi daerah.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi destinasi wisata, tradisi budaya, serta sumber daya lokal yang dimiliki Kabupaten Majene yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan daya tarik pariwisata daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan strategi pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, berbasis pada partisipasi masyarakat, serta mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di samping itu, penelitian ini berupaya mengevaluasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Majene, guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat dalam mengoptimalkan peran sektor pariwisata sebagai motor penggerak peningkatan PAD pada tahun 2025.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di Kabupaten Majene. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan (pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat), observasi lapangan di destinasi wisata utama, serta telaah dokumen kebijakan dan data statistik pariwisata. Analisis dilakukan menggunakan metode analisis tematik (*thematic analysis*) untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan tema utama terkait potensi, hambatan, serta strategi pengembangan pariwisata.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini ingin mengkaji bagaimana potensi pariwisata Kabupaten Majene, baik dari segi sumber daya alam, budaya, maupun infrastruktur, dapat diidentifikasi dan dipetakan guna mendukung peningkatan kunjungan wisatawan. Kedua, penelitian ini menelaah berbagai faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Majene, khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketiga, penelitian ini berupaya merumuskan strategi pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang efektif, berkelanjutan, serta berbasis masyarakat, agar potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Majene dapat dioptimalkan untuk memperkuat daya saing dan kesejahteraan ekonomi daerah.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan kebijakan pariwisata di Kabupaten Majene. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian ekonomi daerah melalui perspektif transformasi pariwisata sebagai penggerak PAD. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam merancang kebijakan dan program pengembangan pariwisata yang adaptif terhadap perubahan zaman, berbasis kearifan lokal, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Majene secara berkelanjutan.

2. LITERATURE REVIEW

A. Konsep Transformasi Pariwisata

Transformasi pariwisata merupakan proses perubahan yang menyeluruh dalam sistem pariwisata, meliputi aspek kebijakan, pengelolaan destinasi, inovasi produk wisata, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Menurut Butler (2019), transformasi pariwisata adalah bentuk adaptasi sistemik yang melibatkan perubahan paradigma dari eksploitasi sumber daya menuju pengelolaan berkelanjutan. Transformasi ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga berfokus pada penciptaan nilai ekonomi dan sosial yang lebih luas.

Dalam konteks daerah, transformasi pariwisata menuntut adanya pergeseran dari model pembangunan berbasis proyek menuju model berbasis potensi lokal dan kolaborasi multipihak. Majene, dengan kekayaan alam, budaya, dan tradisi maritimnya, memiliki peluang untuk menjadikan transformasi pariwisata sebagai instrumen penggerak ekonomi daerah, asalkan pengelolaannya memperhatikan aspek keberlanjutan dan keadilan sosial.

B. Pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator kemandirian fiskal daerah. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dapat berasal dari pajak hotel dan restoran, retribusi objek wisata, serta aktivitas ekonomi turunan seperti transportasi, kuliner, dan produk kerajinan lokal (Yoeti, 2021). Menurut BPS (2023), daerah dengan destinasi wisata unggulan cenderung mengalami peningkatan PAD secara signifikan karena aktivitas wisata mampu menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian lokal.

Bagi Kabupaten Majene, pariwisata berpotensi menjadi sumber PAD baru yang lebih berkelanjutan dibandingkan sektor ekstraktif. Namun, kontribusi tersebut hanya dapat tercapai apabila terdapat sinergi antara promosi, infrastruktur, dan tata kelola destinasi yang profesional. Oleh karena itu, studi ini menekankan pentingnya strategi penguatan manajemen pariwisata sebagai pilar utama transformasi ekonomi daerah.

C. Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Wisata

Menurut Gunn (2018), pengembangan destinasi wisata harus memperhatikan empat pilar utama: atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan kelembagaan. Dalam konteks daerah seperti Majene, pengelolaan wisata tidak bisa hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi harus melibatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama. Pendekatan *community-based tourism* (CBT) menjadi relevan karena menempatkan masyarakat sebagai pemilik, pengelola, sekaligus penerima manfaat langsung dari aktivitas wisata.

Penting pula memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Seperti dikemukakan oleh Hall dan Lew (2019), pariwisata yang berorientasi pada keberlanjutan (*sustainable tourism*) harus menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi, pelestarian lingkungan, dan penguatan sosial budaya. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan pariwisata Majene perlu menekankan pada pelestarian sumber daya alam dan budaya lokal sebagai daya tarik utama.

D. Transformasi Digital dan Promosi Wisata Daerah

Transformasi digital dalam sektor pariwisata menjadi faktor penentu dalam meningkatkan daya saing destinasi (UNWTO, 2022). Digitalisasi memungkinkan promosi wisata berbasis data, pemesanan daring, serta penyebaran informasi yang lebih luas dan cepat. Kabupaten Majene perlu mengadopsi strategi promosi digital yang efektif dengan memanfaatkan media sosial, *website* resmi destinasi, serta kolaborasi dengan *influencer* atau *travel content creator* untuk memperkenalkan potensi wisata lokal ke pasar nasional dan internasional.

Selain itu, digitalisasi dapat membantu pengelolaan data wisatawan, evaluasi dampak ekonomi, serta perencanaan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Dengan demikian, transformasi digital merupakan bagian integral dari transformasi pariwisata itu sendiri.

E. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis penelitian ini didasarkan pada teori pembangunan berkelanjutan (Sachs, 2015) dan teori ekonomi lokal endogen (Todaro, 2016). Pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan, sedangkan teori ekonomi lokal endogen menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus bertumpu pada pemanfaatan potensi internal daerah. Kedua teori ini menjadi landasan konseptual untuk memahami bagaimana transformasi pariwisata di Majene dapat menjadi penggerak peningkatan PAD secara berkelanjutan.

3. RESEARCH METHOD

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam dinamika transformasi sektor pariwisata di Kabupaten Majene dan kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial melalui eksplorasi terhadap makna, perspektif, dan pengalaman para pelaku yang terlibat.

Fokus penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana kebijakan, potensi, dan praktik pengelolaan pariwisata dapat bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga berupaya menafsirkan konteks sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang memengaruhi peran pariwisata terhadap PAD Majene.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang memiliki potensi wisata alam, bahari, dan budaya yang beragam. Beberapa lokasi pengamatan lapangan difokuskan pada:

1. Pantai Dato dan Barane – sebagai destinasi unggulan berbasis wisata bahari.
2. Desa Buttu Baruga dan Bonde – sebagai contoh pengembangan wisata budaya dan kuliner lokal.
3. Kawasan Pamboang dan Sendana – sebagai wilayah dengan potensi wisata alam dan laut yang sedang berkembang.

Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan keterwakilan karakteristik destinasi wisata Majene serta adanya aktivitas ekonomi masyarakat yang berhubungan langsung dengan sektor pariwisata.

C. Subjek dan Informan Penelitian

Informan penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu berdasarkan relevansi dan keterlibatan mereka dalam pengembangan pariwisata daerah. Adapun kategori informan meliputi:

- Pejabat pemerintah daerah, seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Pendapatan Daerah, untuk memperoleh data kebijakan dan kontribusi PAD.
- Pelaku usaha wisata, seperti pemilik *homestay*, pemandu wisata, pengrajin, dan pelaku UMKM di sekitar destinasi.
- Tokoh masyarakat dan adat, yang memahami sejarah, nilai budaya, dan peran masyarakat dalam menjaga potensi wisata.
- Akademisi dan pemerhati pariwisata, untuk memperkaya analisis melalui perspektif ilmiah dan evaluatif.

Total informan dalam penelitian ini sebanyak 20 orang, terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan akademisi, dengan komposisi yang memungkinkan munculnya data yang beragam dan komprehensif.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

- 1) Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pandangan, pengalaman, dan strategi yang diterapkan oleh para pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata dan peningkatan PAD.

- 2) Observasi lapangan

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas wisata, infrastruktur pendukung, dan interaksi masyarakat dengan wisatawan. Observasi juga mencakup kondisi aksesibilitas, kebersihan lingkungan, serta keberadaan fasilitas ekonomi lokal seperti kios dan penginapan.

- 3) Dokumentasi dan telaah literatur

Dokumen yang dikaji meliputi data statistik pariwisata, laporan keuangan daerah, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah* (RPJMD), serta dokumen kebijakan sektor pariwisata. Literatur ilmiah juga digunakan untuk memperkuat analisis konseptual dan kontekstual penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis tematik (*thematic analysis*) sebagaimana dikemukakan oleh Braun dan Clarke (2016). Analisis ini dilakukan melalui enam tahapan, yaitu:

1. Familiarisasi data – membaca, mencatat, dan memahami konteks hasil wawancara dan observasi.
2. Pemberian kode awal (*initial coding*) – mengidentifikasi kata kunci dan gagasan penting dari data.
3. Pencarian tema (*searching for themes*) – mengelompokkan kode ke dalam tema-tema seperti potensi, hambatan, kebijakan, dan transformasi pariwisata.
4. Peninjauan tema (*reviewing themes*) – memverifikasi kesesuaian tema dengan data empiris.
5. Pendefinisian tema (*defining and naming themes*) – memberi makna pada setiap tema sesuai tujuan penelitian.
6. Penulisan laporan akhir (*reporting*) – menyusun narasi analitis yang menggambarkan hubungan antara transformasi pariwisata dan peningkatan PAD Majene.

F. Validitas dan Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. *Triangulasi sumber* dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, sedangkan *triangulasi metode* dilakukan dengan mengombinasikan hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Selain itu, dilakukan *member checking* kepada informan kunci untuk memastikan kesesuaian interpretasi data dengan kondisi faktual di lapangan.

G. Etika Penelitian

Penelitian ini memperhatikan prinsip etika penelitian sosial, yaitu menghormati privasi dan hak informan. Sebelum wawancara, setiap informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, dan persetujuan mereka diperoleh secara sukarela. Identitas informan disamarkan untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data.

4. RESULTS AND DISCUSSION

A. Potensi Pariwisata Majene sebagai Sumber PAD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Majene memiliki beragam potensi pariwisata yang meliputi wisata bahari, budaya, dan alam. Dinas Pariwisata Majene menegaskan bahwa arah pembangunan pariwisata daerah telah diarahkan untuk menjadi salah satu *leading sector* dalam penguatan ekonomi lokal. Beberapa objek wisata unggulan seperti Pantai Dato, Pantai Barane, dan Air Terjun Limbong Sitodo menjadi destinasi yang paling banyak dikunjungi wisatawan domestik. Selain itu, potensi wisata budaya seperti kain sutra tradisional, upacara adat, dan kuliner khas Mandar memiliki nilai jual tinggi jika dikemas secara profesional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Pokdarwis* (Kelompok Sadar Wisata), diketahui bahwa peran mereka sebagai ujung tombak transformasi PAD masih terbatas karena belum memiliki payung hukum yang jelas. Banyak destinasi wisata yang dikelola oleh *BUMDes* atau kelompok masyarakat tanpa regulasi yang mengatur mekanisme bagi hasil atau kontribusi terhadap PAD. *Pokdarwis* menilai bahwa apabila kelembagaan diperkuat dan sinergi antar-pihak terjalin dengan baik, kontribusi mereka terhadap ekonomi daerah dapat meningkat signifikan.

Selain itu, Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan mengemukakan gagasan pentingnya pengembangan agrowisata, seperti wisata edukatif di lahan perkebunan kakao, padi, dan tanaman hortikultura. Menurut mereka, agrowisata tidak hanya memberi pengalaman wisata berbeda, tetapi juga menjadi sumber tambahan pendapatan bagi petani sekaligus memperluas basis PAD daerah.

Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan menyoroti peluang pengembangan wisata bahari dan kuliner berbasis hasil laut. Wilayah pesisir seperti Pamboang dan Sendana memiliki daya tarik tersendiri untuk dikembangkan menjadi wisata *snorkeling*, *mangrove*, dan budidaya ikan air tawar di bendungan. Potensi ini sekaligus dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir.

B. Kelembagaan dan Regulasi Pengelolaan Wisata

Temuan lapangan menunjukkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan pariwisata Majene adalah ketiadaan regulasi daerah yang spesifik terkait pengelolaan destinasi wisata oleh masyarakat atau swasta. Pengelola Pantai Munu, misalnya, menyampaikan bahwa belum adanya dasar hukum membuat mereka kesulitan mengakses bantuan pemerintah dan menghadapi ketidakpastian status pengelolaan.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*DPM-PTSP*), yang menyoroti lemahnya sistem perizinan usaha wisata dan kuliner. Banyak pelaku usaha beroperasi tanpa izin karena tidak adanya Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah yang secara eksplisit mengatur pengelolaan investasi wisata. Kondisi ini menyebabkan kontribusi sektor swasta terhadap PAD menjadi tidak optimal.

Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan mengungkapkan bahwa kendala anggaran daerah juga menjadi hambatan utama dalam membangun infrastruktur pendukung wisata seperti embung, jalan tani, dan fasilitas *agroforestry*. Upaya menggandeng investor swasta melalui skema kemitraan publik-swasta (*Public Private Partnership*) diusulkan sebagai solusi strategis untuk memperluas dampak pembangunan pariwisata terhadap perekonomian daerah.

C. Kolaborasi dan Sinergi Antar-Sektor

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa pengembangan pariwisata di Majene masih bersifat sektoral dan parsial, belum terintegrasi dalam kerangka kebijakan lintas-OPD. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (*Bappeda*) menekankan pentingnya menempatkan pariwisata sebagai sektor super prioritas dalam rencana pembangunan lima tahun ke depan. Strategi ini mencakup penguatan akses jalan antar-destinasi, pembagian zona wisata, serta promosi terintegrasi melalui kalender wisata daerah dan media digital.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (*DPMD*) menambahkan bahwa potensi desa wisata di Majene sebenarnya sangat besar, tetapi implementasinya belum maksimal karena lemahnya kolaborasi antara *BUMDes*, perangkat desa, dan *Pokdarwis*. *P3MD* (Pendamping Desa) menegaskan perlunya penguatan identitas budaya Majene melalui konsep wisata berbasis kain sutra, termasuk pembangunan galeri kain sutra sebagai pusat edukasi dan promosi wisata budaya.

Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah (*BRIDA*) menggarisbawahi pentingnya konsep pariwisata sehat, sejalan dengan posisi Majene sebagai wakil Sulawesi Barat dalam program Kota Sehat. *BRIDA*

merekomendasikan pelaksanaan survei kepuasan pengunjung untuk menilai tingkat kenyamanan, keamanan, dan kebersihan destinasi, yang hasilnya dapat dijadikan dasar peningkatan standar kualitas wisata.

D. Kondisi Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung

Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar destinasi wisata di Majene masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, seperti akses jalan sempit, kurangnya fasilitas sanitasi, dan minimnya area parkir. Hal ini berdampak pada daya saing destinasi dibandingkan daerah tetangga seperti Mamuju dan Polewali Mandar.

Selain itu, masih banyak tempat usaha wisata yang belum memenuhi standar pelayanan wisatawan, terutama dalam aspek kebersihan dan keamanan. *DPM-PTSP* menilai bahwa pengelolaan air minum di sejumlah lokasi wisata belum layak konsumsi, yang dapat menurunkan citra pariwisata daerah. Oleh karena itu, penguatan standar layanan dan pengawasan usaha menjadi salah satu kebutuhan mendesak agar Majene dapat bersaing secara regional.

E. Partisipasi Masyarakat dan Dampak Ekonomi

Dari sisi sosial-ekonomi, penelitian menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata cukup tinggi, terutama di daerah wisata berbasis komunitas seperti Desa Bonde dan Buttu Baruga. Masyarakat terlibat dalam penyediaan kuliner lokal, penginapan sederhana, dan kegiatan kebersihan lingkungan wisata.

Namun, kontribusi ekonomi yang diterima masyarakat belum merata karena masih minimnya pelatihan dan dukungan modal usaha. *Pokdarwis* mengakui perlunya program penguatan kapasitas masyarakat, termasuk pelatihan manajemen usaha dan *digital marketing*, agar masyarakat tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga pelaku utama dalam ekosistem pariwisata daerah.

Dari sisi kontribusi terhadap PAD, data yang dihimpun dari Badan Pendapatan Daerah (*Bapenda*) menunjukkan bahwa pendapatan dari sektor pariwisata pada tahun 2023 masih berada di bawah 2% dari total PAD Kabupaten Majene. Angka ini menunjukkan adanya potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama jika sektor pariwisata dikelola lebih profesional dan berbasis potensi lokal.

F. Dinamika Kebijakan dan Arah Transformasi Pariwisata

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dan observasi, arah transformasi pariwisata di Kabupaten Majene dapat dikategorikan dalam tiga dimensi utama:

1. Dimensi kelembagaan, yaitu penguatan regulasi, pembentukan badan pengelola destinasi wisata, dan koordinasi lintas-OPD.
2. Dimensi ekonomi, melalui diversifikasi produk wisata, pemberdayaan UMKM, dan promosi investasi wisata.
3. Dimensi sosial-budaya dan lingkungan, yang menekankan partisipasi masyarakat serta keberlanjutan ekologi destinasi wisata.

Transformasi ini membutuhkan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan fiskal.

G. Pembahasan

1) Transformasi Pariwisata sebagai Arah Strategis Peningkatan PAD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi pariwisata di Kabupaten Majene merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan pandangan Yoeti (2021) yang menyebutkan bahwa pariwisata memiliki efek ganda (*multiplier effect*) terhadap ekonomi lokal melalui pajak, retribusi, dan aktivitas ekonomi turunan seperti transportasi, penginapan, dan kuliner. Namun, kontribusi sektor ini terhadap PAD Majene masih rendah karena pengelolaannya belum terintegrasi dalam sistem tata kelola yang efektif dan berkelanjutan.

Transformasi yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik destinasi wisata, tetapi juga melibatkan perubahan paradigma pembangunan daerah. Selama ini, kebijakan pariwisata Majene masih bersifat reaktif dan berbasis proyek, belum diarahkan pada pembangunan sistemik yang memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Oleh karena itu, Majene perlu menempatkan sektor pariwisata sebagai pilar ekonomi daerah, sejajar dengan sektor pertanian dan perikanan.

Dari hasil wawancara dengan *Bappeda*, terlihat adanya kesadaran baru bahwa pariwisata dapat menjadi sektor “super prioritas” pembangunan lima tahun ke depan. Dengan demikian, Majene dapat beralih dari status “daerah persinggahan” menjadi destinasi utama pariwisata Sulawesi Barat. Pandangan ini mempertegas arah transformasi ekonomi Majene yang lebih berorientasi pada keberlanjutan dan kemandirian daerah.

2) Integrasi Kelembagaan dan Regulasi Pengelolaan Pariwisata

Salah satu aspek penting dari transformasi ini adalah penguatan tata kelola pariwisata berbasis kolaboratif. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan pariwisata tanpa dukungan masyarakat lokal, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas kreatif. Kolaborasi ini sejalan dengan konsep *pentahelix* yang menempatkan lima unsur (pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media) sebagai

kekuatan sinergis dalam menggerakkan sektor pariwisata. Dalam konteks Majene, model ini dapat diterapkan melalui forum komunikasi pariwisata daerah, penguatan peran *BUMDes* dalam pengelolaan destinasi, dan pelatihan masyarakat lokal dalam industri pariwisata kreatif.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa lemahnya regulasi dan koordinasi kelembagaan menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan pariwisata di Majene. Hingga saat ini, belum terdapat peraturan daerah yang secara spesifik mengatur pembagian kewenangan dan mekanisme pengelolaan destinasi wisata antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Akibatnya, muncul tumpang tindih kewenangan antara *Pokdarwis*, *BUMDes*, dan dinas terkait.

Hal ini sesuai dengan teori tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2017), bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh adanya koordinasi, kejelasan peran, dan kesepakatan bersama antaraktor. Oleh karena itu, transformasi pariwisata Majene harus dimulai dari reformasi kelembagaan, yang menempatkan pariwisata sebagai urusan lintas sektor dengan koordinasi utama pada Dinas Pariwisata, didukung *Bappeda*, *DPMD*, *DPM-PTSP*, serta *Pokdarwis*.

Lebih lanjut, peran hukum daerah menjadi kunci legitimasi dan keberlanjutan pengelolaan wisata. Hasil wawancara dengan pengelola Pantai Munu menunjukkan ketidakpastian hukum yang membuat mereka ragu berinvestasi dalam fasilitas wisata. Dengan adanya payung hukum, pemerintah dapat mengatur mekanisme retribusi, sistem bagi hasil, serta insentif bagi pengelola yang berkontribusi terhadap PAD.

3) Kolaborasi Multisektor: Pendekatan Transformasi Ekonomi Lokal

Dari sisi ekonomi, pariwisata berpotensi memberikan *multiplier effect* terhadap sektor-sektor lain seperti perdagangan, pertanian, perikanan, dan transportasi. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, permintaan terhadap produk lokal akan ikut naik. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat PAD melalui pajak hotel, restoran, retribusi objek wisata, dan izin usaha. Namun, optimalisasi kontribusi PAD hanya akan tercapai jika ada sistem pengelolaan pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien. Reformasi sistem retribusi wisata serta pemanfaatan teknologi *e-retribusi* menjadi bagian penting dari upaya tersebut.

Transformasi pariwisata di Majene harus dipahami sebagai proses lintas sektor yang mengintegrasikan potensi pertanian, perikanan, budaya, dan industri kreatif. Kolaborasi multisektor ini sejalan dengan teori ekonomi lokal endogen (Todaro, 2016) yang menekankan pentingnya memanfaatkan potensi internal daerah sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

Dinas Pertanian dan Perikanan telah menunjukkan potensi sinergi melalui pengembangan agrowisata dan wisata bahari. Konsep pertanian terpadu dengan wisata edukatif dapat menjadi daya tarik baru sekaligus menambah pendapatan petani. Begitu pula wisata bahari dan kuliner laut dapat memperkuat citra Majene sebagai “Kota Pesisir Berbudaya”.

Namun, agar sinergi ini berjalan efektif, diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara OPD teknis dan masyarakat. *DPMD* dan *P3MD* menggarisbawahi pentingnya memperkuat peran desa dalam pengelolaan wisata berbasis komunitas, karena desa memiliki aset sosial dan budaya yang dapat dijadikan *lokus* wisata. Pengembangan desa wisata berbasis kain sutra merupakan contoh konkret bagaimana potensi budaya dapat diintegrasikan dengan pengembangan ekonomi lokal.

Transformasi ekonomi melalui pariwisata juga dapat diperkuat dengan membangun ekosistem UMKM wisata. *Pokdarwis*, *BUMDes*, dan pelaku usaha lokal perlu diberikan pelatihan *digital marketing* dan manajemen usaha, sehingga mereka mampu meningkatkan daya saing produk wisata seperti kuliner, kerajinan, dan *homestay*.

4) Transformasi Digital sebagai Instrumen Daya Saing Daerah

Selain tata kelola, inovasi digitalisasi pariwisata menjadi kunci transformasi di era modern. Penggunaan teknologi informasi dan media sosial dapat meningkatkan visibilitas destinasi wisata Majene secara luas. Digitalisasi bukan hanya dalam promosi, tetapi juga dalam sistem reservasi, pemandu virtual, dan transaksi digital yang mendukung efisiensi serta transparansi pendapatan. Kabupaten Majene, misalnya, dapat mengembangkan *Majene Tourism Platform* sebagai sistem informasi pariwisata terintegrasi yang dikelola bersama oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Transformasi digital menjadi salah satu elemen penting dalam penguatan pariwisata modern. Majene belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi dalam promosi destinasi wisata. Sejalan dengan rekomendasi UNWTO (2022), digitalisasi dapat mendorong efisiensi manajemen, memperluas jangkauan promosi, dan meningkatkan interaksi antara wisatawan dan pengelola destinasi.

Dalam konteks Majene, digitalisasi dapat diterapkan melalui:

1. Pembuatan portal wisata terintegrasi yang memuat informasi destinasi, kalender *event*, dan sistem reservasi daring.
2. Promosi melalui media sosial resmi pemerintah dan komunitas pariwisata, termasuk kerja sama dengan *influencer* lokal.

3. Digitalisasi data pengunjung dan PAD sektor wisata, untuk mendukung kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya soal promosi, tetapi juga bagian dari strategi tata kelola cerdas (*smart tourism governance*) yang meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan sektor pariwisata.

- 5) Penguatan Infrastruktur dan Kualitas Destinasi

Kualitas infrastruktur menjadi salah satu determinan utama dalam keberhasilan transformasi pariwisata. Observasi lapangan menunjukkan bahwa akses jalan menuju beberapa destinasi masih terbatas, fasilitas sanitasi belum memadai, dan belum ada sistem transportasi wisata yang terintegrasi. Kondisi ini menurunkan daya saing Majene dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Barat.

Sebagai solusi, pemerintah daerah dapat mengarahkan investasi publik pada pembangunan konektivitas antar destinasi wisata utama, misalnya menghubungkan Pantai Dato–Bonde–Sendana dalam satu jalur wisata pesisir. Konsep *cluster* wisata terpadu dapat diterapkan agar wisatawan memiliki lebih banyak pilihan aktivitas dan menghabiskan waktu lebih lama di Majene, yang pada akhirnya meningkatkan pengeluaran wisatawan dan kontribusi terhadap PAD.

Selain itu, konsep pariwisata sehat yang disampaikan oleh *BRIDA* perlu dijadikan standar baru. Standar ini mencakup kebersihan lingkungan, keamanan fasilitas, dan kepuasan pengunjung. Melalui survei dan evaluasi rutin, pemerintah dapat menetapkan indikator kinerja pariwisata berbasis mutu, bukan sekadar jumlah kunjungan.

- 6) Model Transformasi Pariwisata Majene

Transformasi pariwisata di Kabupaten Majene tidak hanya menuntut perubahan fisik dan infrastruktur, tetapi juga perubahan paradigma dalam memandang sektor ini sebagai penggerak ekonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majene memiliki potensi pariwisata berbasis alam, budaya, dan kuliner yang sangat kaya. Namun, sebagian besar potensi tersebut belum dikemas dalam bentuk produk wisata yang bernilai ekonomi tinggi. Di sinilah letak urgensi transformasi, yaitu mengubah potensi menjadi kekuatan ekonomi melalui inovasi pengelolaan, kolaborasi multipihak, dan peningkatan daya saing destinasi.

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian, model transformasi pariwisata Majene dapat dirumuskan melalui tiga tahapan utama:

1. Tahap Konsolidasi (2024–2026)
 - Penguatan regulasi dan kelembagaan.
 - Penyusunan Peraturan Daerah tentang pengelolaan pariwisata dan retribusi PAD.
 - Pembentukan *Majene Tourism Board* sebagai lembaga koordinatif lintas sektor.
2. Tahap Akselerasi (2026–2027)
 - Pengembangan destinasi unggulan berbasis komunitas.
 - Peningkatan infrastruktur wisata dan digitalisasi promosi.
 - Pelatihan dan penguatan kapasitas masyarakat serta UMKM wisata.
3. Tahap Konsolidasi Ekonomi (2027–2030)
 - Optimalisasi kontribusi pariwisata terhadap PAD melalui diversifikasi pajak dan retribusi wisata.
 - Pengembangan produk wisata tematik seperti agrowisata, wisata budaya sutra, dan wisata bahari edukatif.
 - Evaluasi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkala.

Model ini menempatkan transformasi pariwisata sebagai strategi utama peningkatan PAD sekaligus sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan.

- 7) Implikasi Kebijakan

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan utama transformasi pariwisata Majene terletak pada keterbatasan infrastruktur, kurangnya promosi yang konsisten, serta minimnya kualitas SDM di sektor pariwisata. Oleh karena itu, strategi penguatan harus difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat lokal, pembangunan akses jalan dan sarana transportasi ke destinasi, serta penyusunan *roadmap* pariwisata daerah yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*).

Berdasarkan keseluruhan temuan dan pembahasan, terdapat beberapa implikasi kebijakan penting bagi pemerintah daerah:

- Pertama, perlunya peraturan daerah tentang pengelolaan pariwisata daerah yang mengatur sinergi antar-OPD, *Pokdarwis*, dan *BUMDes*.
- Kedua, pentingnya pembentukan badan pengelola pariwisata terpadu yang memiliki kewenangan koordinatif lintas sektor.
- Ketiga, pemerintah daerah perlu menetapkan pariwisata sebagai prioritas utama *RPJMD* 2025–2030, dengan alokasi anggaran yang memadai.

- Keempat, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan digitalisasi sektor pariwisata agar Majene mampu bersaing di tingkat regional.
- Kelima, pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis komunitas untuk memastikan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

8) Strategi Konservasi Budaya

Faktor budaya juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Tradisi maritim, upacara adat, serta seni lokal seperti musik dan tenun khas Majene berpotensi menjadi ikon wisata budaya. Namun demikian, perlu strategi konservasi budaya agar pengembangan pariwisata tidak menimbulkan komersialisasi berlebihan yang mengikis nilai-nilai tradisi. Prinsip keberlanjutan harus dijadikan dasar agar pengembangan ekonomi melalui pariwisata tidak mengorbankan identitas sosial dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, transformasi pariwisata di Majene dapat menjadi katalis peningkatan PAD jika didukung oleh kebijakan yang berpihak pada inovasi, investasi, dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan potensi lokal.

5. CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi pariwisata Kabupaten Majene merupakan kebutuhan strategis dalam memperkuat struktur ekonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Transformasi tersebut mencakup penguatan tata kelola kolaboratif, digitalisasi promosi dan layanan wisata, pengembangan produk wisata berbasis potensi lokal, serta penerapan prinsip keberlanjutan. Keberhasilan transformasi pariwisata sangat ditentukan oleh sinergi antarpihak, inovasi dalam pengelolaan destinasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal. Dengan strategi yang tepat, sektor pariwisata tidak hanya menjadi penggerak ekonomi potensial tetapi juga wadah pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya daerah.

Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah daerah perlu menyusun *blueprint* pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan strategi peningkatan PAD dan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan bagi masyarakat lokal serta pelaku usaha wisata harus menjadi prioritas utama. Di samping itu, percepatan digitalisasi sektor pariwisata perlu dilakukan secara menyeluruh, mencakup promosi, transaksi, dan sistem retribusi agar tercipta transparansi dan kemudahan layanan publik.

Kolaborasi berbasis konsep *pentahelix* antara pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, media, dan komunitas lokal juga perlu diperkuat guna memperluas jejaring, menciptakan inovasi wisata, serta memperkuat posisi Kabupaten Majene dalam peta pariwisata nasional. Pemanfaatan potensi budaya dan sumber daya lokal hendaknya dilakukan dengan tetap menjaga nilai kearifan lokal dan kelestarian lingkungan agar pengembangan pariwisata dapat memberikan manfaat jangka panjang. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Majene tahun 2025 dan seterusnya.

REFERENCES

- Abdullah, M., & Karim, R. (2021). Transformasi ekonomi daerah melalui sektor pariwisata berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 10(2), 87–102.
- Adam, A., & Hadi, R. (2020). Kontribusi pariwisata terhadap peningkatan PAD di daerah tujuan wisata Indonesia Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 34–49.
- Aisyah, R. (2021). Peran wisata budaya dalam peningkatan PAD: Studi kasus di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ekonomi Lokal*, 12(2), 115–130.
- Andayani, S., & Maulana, Y. (2022). Analisis efisiensi pengelolaan retribusi objek wisata dalam meningkatkan PAD daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 14(3), 176–191.
- Anwar, S. (2015). *Manajemen pariwisata berkelanjutan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Archer, B. H. (1973). *The impact of domestic tourism*. Cardiff: University of Wales Press.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2021). *Rencana pembangunan pariwisata daerah di Indonesia*. Jakarta: Bappenas.
- Bappeda Provinsi Sulawesi Barat. (2023). *Rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPDa) Sulawesi Barat 2023–2033*. Mamuju: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Majene. (2024). *Laporan tahunan pengembangan destinasi wisata Kabupaten Majene 2024*. Majene: Pemerintah Daerah Kabupaten Majene.
- Dwyer, L., & Kim, C. (2003). Destination competitiveness and bilateral tourism flows between Australia and Korea. *Journal of tourism studies*, 14(2), 55–67. <https://search.informit.org/doi/10.3316/jelapa.200402854>
- Fahmi, I., & Lestari, D. (2023). Strategi transformasi digital dalam promosi pariwisata daerah. *Jurnal Inovasi Digital*, 4(1), 22–39.
- Firdaus, M., & Rahman, S. (2021). Kebijakan fiskal daerah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata. *Jurnal Ekonomi Regional*, 9(2), 98–113.

- Fita, G. A., Asriani, A., Amiruddin, A., & Fariaty, C. N. (2022). Pendampingan analisis potensi desa wisata di desa Pamboborang kecamatan Banggae kabupaten Majene. *Minda Baharu*, 6(1), 134-143. <https://doi.org/10.33373/jmb.v6i1.3909>
- Gannon, M. J., & McKeown, T. (2017). The role of community participation in sustainable tourism development. *Tourism Management Perspectives*, 23, 14–21.
- Ghozali, I. (2018). *Metode penelitian untuk manajemen dan akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goeldner, C. R., & Ritchie, J. R. B. (2012). *Tourism: Principles, practices, philosophies* (12th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Gunn, C. A. (1994). *Tourism planning: Basics, concepts, cases* (3rd ed.). Washington, DC: Taylor & Francis.
- Hall, C. M., & Page, S. J. (2019). *Tourism development and management* (6th ed.). London: Routledge.
- Hanifah, H. S., Harahap, E. F., Marlina, S., & Septiana, Y. (2025). Pengembangan desa wisata melalui digital marketing, inovasi produk dan tata kelola kelembagaan BUMDes di kabupaten Garut. *Jurnal Algoritma*, 22(1), 982-992. <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.22-1.2426>
- Hartono, R., Yulianti, S., & Kusuma, A. (2023). Inovasi layanan wisata dan pengaruhnya terhadap kepuasan wisatawan di kawasan pesisir. *Jurnal Pariwisata Berkelanjutan*, 15(3), 245–260.
- Hasan, A. (2023). Transformasi pariwisata berbasis digital: Tantangan dan peluang di Indonesia Timur. *Jurnal Pariwisata Nusantara*, 9(1), 45–60.
- Hidayat, S., & Nugraha, R. (2022). Penerapan konsep pentahelix dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 211–228.
- Hunter, C. (1997). Sustainable tourism as an adaptive paradigm. *Annals of tourism research*, 24(4), 850-867. [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(97\)00036-4](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(97)00036-4)
- Hunter, C. (2002). Sustainable tourism and the role of local communities. *Sustainable Development*, 10(2), 67–76.
- Inskeep, E. (1991). *Tourism planning: An integrated and sustainable development approach*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). *Laporan kinerja pemerintah daerah dan optimalisasi PAD melalui sektor pariwisata*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peran fiskal daerah dalam peningkatan PAD dan penguatan ekonomi lokal*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2022). *Strategi pembangunan pariwisata Indonesia 2025*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Kotler, P., Bowen, J., & Makens, J. (2016). *Marketing for hospitality and tourism*. Pearson Education.
- Kusuma, D. (2021). Strategi branding destinasi pariwisata dalam menarik wisatawan internasional di Indonesia. *Jurnal Pemasaran Wisata*, 8(1), 45–60.
- Morrison, A. M. (2013). *Marketing and managing tourism destinations*. London: Routledge.
- Munawaroh, S., & Yuliani, T. (2021). Analisis daya saing destinasi wisata daerah di era transformasi digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Pariwisata*, 5(2), 78–93.
- Nabila, F. (2023). *Analisis potensi pengembangan wisata dalam meningkatkan ekonomi desa (objek wisata Sawah Sabarang Desa Padang Bulan Kecamatan Kotanopan)* [Skripsi Sarjana, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan]
- Nasution, M. A., & Al-khowarizmi, A. K. (2024). Meningkatkan Potensi Lokal Melalui Website dan Digital Marketing. Perancangan Website Desa, Sekolah, UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Larisma*, 1(2), 56-61. <https://doi.org/10.56495/jpml.v1i2.751>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *Tourism policy responses to the COVID-19 crisis*. Paris: OECD Publishing.
- Pearce, D. G. (2014). *Tourism development*. New York: Longman.
- Pitana, I. G., & Gayatri, P. G. (2019). *Sosiologi pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Prasetyo, E., & Ardiansyah, M. (2023). Pemetaan potensi dan tantangan pengembangan pariwisata di Kabupaten Majene. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 11(4), 267–283.
- Puspawati, D. P. H., & Ristanto, R. (2018). Strategi promosi digital untuk pengembangan pariwisata Kota Magelang. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, 1(2), 1-20. <https://doi.org/10.56354/jendelainovasi.v1i2.14>
- Putri, I. N., Wijaya, S., & Rahayu, T. (2020). Kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata di Bali. *Jurnal Ilmu Pariwisata*, 6(2), 101–118.
- Rachman, F. F., & Rulli, K. (2019). Evaluating the economic impact of tourism on local government revenue in Indonesia. *Asian Journal of Economics and Business*, 18(2), 122–135.
- Rahmawati, L., Azizah, N., & Wahyudi, A. (2022). Tantangan pariwisata berkelanjutan di kawasan pesisir Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*, 14(1), 55–72.
- Santoso, A. (2023). Pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata: Studi kasus di Lombok. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 19(4), 89–105.
- Shrestha, P., & Singh, S. (2020). Tourism development and its impact on local communities: A case study of Nepal. *Journal of Tourism Research*, 45(3), 185–200.
- Siregar, H., & Nugroho, D. (2019). Pentingnya infrastruktur dalam pengembangan sektor pariwisata: Studi di kawasan timur Indonesia. *Jurnal Infrastruktur dan Pengembangan*, 7(3), 135–150.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, R., & Pertiwi, D. (2022). Optimalisasi PAD melalui diversifikasi produk wisata lokal. *Jurnal Ekonomi Terapan*, 8(1), 25–40.

- Taufik, M., & Nurhayati, L. (2020). Pembangunan berkelanjutan dan pengembangan ekonomi lokal di kawasan wisata. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 112–128.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2020). *Tourism and the sustainable development goals – Policy implications*. New York: UNDP.
- Widodo, A. (2017). Promosi digital sebagai strategi efektif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestik. *Jurnal Pemasaran Digital*, 5(4), 88–104.
- World Tourism Organization (UNWTO). (2021). *Tourism for sustainable development in the 21st century*. Retrieved from <https://www.unwto.org>
- Yoeti, O. A. (2018). *Perencanaan dan pengembangan pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, L. L. (1988). *Delivering quality service: Balancing customer perceptions and expectations*. New York: The Free Press.